KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah siapkan banyak DIM RUU TPKS, DPR tak masalah
Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pemerintah Siapkan Banyak DIM RUU TPKS, DPR tak Masalah

FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR akan menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari pemerintah setidaknya pada Selasa (8/2). Namun, hingga berita ini diturunkan, *Republika* belum berhasil mendapatkan keterangan dari pihak Istana terkait hal ini.

"Kita dengar Selasa (disampaikan). Kalau Selasa disampaikan oleh pemerintah, kita langsung lakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR karena itu *kan* kemudian memang jadi perhatian publik dan tuntutan masyarakat dan DPR berkomitmen untuk mendukung itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).

Dasco menegaskan, DPR berkomitmen agar proses terhadap RUU TPKS tidak terlalu lama. Namun, diketahui sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses pada pertengahan Februari ini.

"Karena begitu banyak saya dengar ada substansi dan DIM yang dikirim ke kita, kita tentunya juga ingin membuat RUU TPKS ini dengan baik, kita mau hati-hati, dan juga ingin tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1) lalu.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas (Gugas) percepatan RUU TPKS telah merumuskan 623 daftar inventarisasi masalah (DIM). Banyak substansi baru dalam DIM tersebut.

"Tentunya, DIM pemerintah ini masih butuh banyak masukan dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi," kata Ketua tim gugus tugas RUU TPKS Eddy OS Hiariej dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, (4/2).

Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan pembahasan DIM RUU TPKS tidak terbuka. Staf Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi YLBHI Syafirah Hardani dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, pada 3 Februari 2022, Jaringan Masyarakat Sipil dan Akademisi, termasuk YLBHI, diundang oleh Gugus Tugas RUU TPKS yang dikoordinatori oleh Kepala Staf Kepresidenan untuk memberi masukan DIM RUU TPKS.

Namun, KSP disebut tidak menunjukkan dokumen ataupun tayangan presentasi sehingga dapat melihat poin-poin DIM yang disampaikan. "Para pemateri yang terdiri atas utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kejaksaan Agung, dan Polri menyampaikan hal-hal yang ada di dalam DIM secara verbal sehingga sulit bagi kami untuk melihat satu per satu poin DIM yang telah disusun dua hari sebelumnya," kata Syafirah.

antara **ed:** andri saubani